

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan uji analisis pada bab sebelumnya tentang karakteristik pemerintah dan tingkat akuntabilitas terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Kekayaan Daerah (PAD) terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah lebih besar cenderung memberikan pengungkapan yang lebih sedikit.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Tingkat Ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pemerintah daerah yang tergantung pada transfer pemerintah pusat cenderung memberikan pengungkapan yang lebih sedikit. Misal Kota/Kabupaten Purwakarta (0,2316), Bekasi (0,4986), dan Bogor (0,6252) yang memiliki nilai tingkat ketergantungan lebih rendah dibanding Kota/Kabupaten lainnya atas transfer pemerintah pusat.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Aset terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Banyaknya aset yang dimiliki pemerintah daerah di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak

mempengaruhi dalam luasnya pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Lamanya pemerintah daerah tersebut berdiri mempengaruhi dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah karena memiliki pengalaman yang lebih lama serta banyak dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Opini BPK terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Pemerintah daerah yang menerima opini yang baik lebih cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas. Adanya opini WTP berarti bahwa pemerintah daerah memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Misal Kota/Kabupaten Bogor, Bandung, Depok, dan Cirebon yang memiliki opini yang baik daripada Kota/Kabupaten lainnya.
6. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah temuan audit kelemahan pengendalian internal terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Karena secara keseluruhan telah mencapai efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyajian laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

7. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah temuan audit Ketidapatuhan terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD.

B. Implikasi

Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah dan tingkat akuntabilitas terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018, maka dapat diketahui implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel pengaruh karakteristik pemerintah, terlihat bahwa presentase total aset pada pemerintah daerah rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hal ini terjadi karena tidak semua daerah memiliki aset yang besar sehingga tidak banyak memiliki item-item penyusun aset seperti aset tetap maupun aset lancar yang lebih banyak. Kondisi demikian tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk mengungkapan LKPD yang lebih luas.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada variabel tingkat akuntabilitas, terlihat bahwa presentase pengendalian internal pada beberapa pemerintah daerah rendah. Hal ini terjadi karena masih ada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang belum sepenuhnya menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 1 tahun 2010.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dibahas sebelumnya, berikut adalah saran yang peneliti sampaikan:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat fokus dalam memenuhi kriteria yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pelatihan mengenai pengelolaan aset daerah yang bisa mengurangi adanya temuan dari BPK.
2. Bagi peneliti selanjutnya, memperbanyak variabel independen yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan tingkat pengungkapan LKPD dan menambahkan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah setempat seperti tipe pemerintah, dan jumlah SKPD. Dan juga menambahkan tahun pengamatan agar dapat melihat perkembangan tingkat pengungkapan.
3. Bagi masyarakat, ikut turut serta dalam mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga terciptanya transparansi dan peningkatan kepercayaan publik.